



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
IZIN PENDIRIAN MA'HAD ALY DARUL ULUM
PONDOK PESANTREN DARUL 'ULUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan rumpun ilmu agama Islam dengan pendalaman bidang ilmu keislaman tertentu, pesantren dapat mendirikan Ma'had Aly;
b. bahwa untuk mendirikan Ma'had Aly, pesantren wajib memperoleh izin dari Menteri Agama;
c. bahwa Pondok Pesantren Darul Ulum telah memenuhi syarat untuk mendirikan Ma'had Aly Darul Ulum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Ma'had Aly Darul Ulum Pondok Pesantren Darul 'Ulum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN MA'HAD ALY DARUL ULUM PONDOK PESANTREN DARUL 'ULUM.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Ma'had Aly Darul Ulum Pondok Pesantren Darul 'Ulum yang beralamat di Rejoso, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 61481.



- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Darul 'Ulum (Nomor Statistik Pesantren: 510035170112) dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-8958.AH.01.04. Tahun 2011, dan diberikan Nomor Statistik Ma'had Aly setelah Lembaga menandatangani PAKTA INTEGRITAS yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Ma'had Aly sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan izin penyelenggaraan *Marhalah Ula* (program sarjana) pada *takhasus Alquran wa Ulumuhu* (Al-Qur'an dan ilmu Al-Qur'an) dengan konsentrasi *Allughah wa aladab* (Bahasa dan Sastra Al-Qur'an), dimulai pada Tahun Akademik 1444 Hijriah/1445 Hijriah.
- KEEMPAT : Ma'had Aly sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib:
- a. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. menyelenggarakan *takhasus* dan konsentrasi kajian pada Ma'had Aly, termasuk pemberian gelar akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyampaikan hasil penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA melalui sistem informasi dan manajemen Ma'had Aly sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Sampai dengan dilakukan penjaminan mutu eksternal melalui penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan institusi Ma'had Aly sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dinyatakan memenuhi kriteria mutu pada kategori *maqbul* yang setara terakreditasi dengan peringkat terakreditasi C (Baik) dan penyelenggaraan konsentrasi kajian pada *takhasus* Ma'had Aly sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dinyatakan memenuhi kriteria mutu pada kategori *maqbul* yang setara terakreditasi dengan peringkat terakreditasi C (Baik).
- KEENAM : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berlaku sepanjang Ma'had Aly menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Ma'had Aly sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



ya YAQUT CHOLIL QOUMAS *9*

